

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu**

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ari Wahyu Leksono; Setya Stanto Albertus; dan Rendika Vhalery (2019) Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode tahun 2013-2017	Variabel Independen: 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak	Analisis regresi linear berganda	Ukuran perusahaan dan <i>profitabilitas</i> memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	Mustika (2017) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel Independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. <i>Capital intensity</i> 6. Kepemilikan keluarga	Analisis regresi linear berganda	Variabel <i>orporate social responsibility</i> dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

3.	Jessica dan Agus Arianto Toly (2014) Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen: 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak Variabel Kontrol: 1. Ukuran perusahaan 2. <i>Levergae</i> 3. <i>Capital Intensity</i> 4. <i>Reserarch &amp; development intensity</i> 5. <i>Return on asset</i>	Analisis regresi berganda	Pengaruh pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, <i>Research &amp; Development Intensity</i> dan <i>Return on Asset</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak
4.	Roman Lanis & Grant Richardson (2012)  <i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An empirical analysis</i>	Variabel Independen: 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak Variabel Kontrol: 1. <i>Trouble</i> 2. <i>Age Public</i> 3. <i>Management Stock Ownership of the Board of Directors (MTOBOD)</i> 4. <i>CEO Tenure (CEOTENURE)</i> 5. <i>CEO Duality (CEODUAL)</i> 6. <i>Block Held (BLOCKHLD)</i> 7. <i>Corporation</i> 8. <i>Size (SIZE)</i> 9. <i>Leverage (LEV)</i> 10. <i>Capital Intensity (CINT)</i> 11. <i>Inventory Intensity (INVINT)</i> 12. <i>Research and Development Intensity (RDINT)</i> 13. <i>the Market-to-Book Ratio (MKTBK)</i> 14. <i>Return on Assets (ROA)</i>	Analisis regresi berganda	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah tingkat agresivitas yang dilakukan. Komitmen investasi sosial, perusahaan dan startegi perusahaan merupakan elemen penting dalam kegiatan CSR yang mempunyai dampak negatif/tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5.	Dwi Fionasari, Enni Savitri, Andreas (2017)	Variabel Independen: 1. Pengungkapan	Analisis regresi	Pengungkapan <i>corporate social</i>

	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia)	<i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak Variabel Kontrol: 1. Ukuran perusahaan 2. <i>Leverage</i> 3. Pertumbuhan usaha (PBV)	berganda	<i>responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	Novia Bani Nugraha, Wahyu Meiranto (2015)  Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013)	Variabel Independen: 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. <i>Capital intensity</i> Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak	Analisis regresi berganda	CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya dengan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan.
7.	Elsa Puspitasari, Dwi Ermayanti (2019)  Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> Variabel Moderasi: 1. <i>Good corporate governance</i> Variabel Dependen: 1. <i>Price to book value</i> (PBV)	Analisis jalur ( <i>path analysis</i> )	Pengungkapan <i>coprorate social responsibility</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan praktik <i>good corporate governance</i> dapat memperlemag pengaruh pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .
8.	Hengky Robert M Tarigan (2016)  Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris	Variabel Independen: 1 <i>Corporate Social Responsibility</i> 2 Profitabilitas Variabel Dependen: 1. Agresivitas pajak	Analisis regresi berganda	CSR memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan dan diungkapkan oleh perusahaan, maka

	oada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014			beban pajak perusahaan akan berkurang dan hal tersebut menyebabkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang melanggar hukum.
9.	Dahlia Sari, Christine Tjen (2016) <i>Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance, and Tax Aggressiveness</i>	Variabel Independen: 1. <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>  Variabel Moderasi: 1. Kinerja keuangan  Variabel Kontrol: 1. Ukuran perusahaan 2. <i>Leverage</i> 3. Profitabilitas 4. <i>Listed Period of Firm (AGEPUB)</i> 5. <i>Block Holder (BHD)</i> 6. <i>Management Stock Ownership of the Board of Directors (MTOBOD)</i> 7. <i>Investor Intensity (INVINT)</i> 8. <i>Market to Book Ratio (MKTB)</i>  Variabel Dependen: 1. Pengungkapan CSR	Analisis regresi berganda	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin rendah pula agresivitas pajak di Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk variabel kinerja keuangan. Semakin bagus kinerja keuangan perusahaan, maka semakin rendah pula agresivitas pajak yang dilakukan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Meiranto, 2015), dimana persamaannya adalah menggunakan *corporate social responsibility (CSR)*, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas sebagai variabel independen, serta agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dengan data tahun 2015-2019, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan non keuangan tahun 2012-2013.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan secara berkelanjutan meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi (Mandaika & Hasan, 2015). Menurut teori ini, kegiatan operasional perusahaan haruslah sesuai dengan lingkungan dimana perusahaan berada. Lingkungan dalam hal ini bukanlah sekedar lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi atau masyarakat sekitar perusahaan berada, namun juga perusahaan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

(O'Donovan, 2002 dalam Lindawati & Puspita, 2015) legitimasi dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup suatu organisasi yang dicapai melalui tindakan organisasi yang sesuai aturan dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Akan tetapi menurut (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Lindawati & Puspita, 2015) perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan

pengungkapan informasi lingkungan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas aktivitas perusahaan yang dilakukan. Legitimasi dapat tercapai apabila keberadaan perusahaan tidak mengganggu nilai-nilai dalam masyarakat.

### **2.2.2 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* berpandangan bahwa perusahaan haruslah mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder* (Luthfi, 2017). (Grey *et al*, 2001 dalam Luthfi, 2017) yang dimaksud dengan stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, *stakeholder* yang diantaranya adalah masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain. Dengan demikian, *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap perusahaan.

*Stakeholder* menurut (Hadi, 2011, hal. 93-95) adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Pihak internal maupun eksternal yang dimaksud adalah pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

### 2.2.3 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba melalui perencanaan pajak baik dengan cara yang legal maupun ilegal yaitu *tax evasion* (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Tindakan ini tidak selalu tentang ketidak patuhan terhadap peraturan perpajakan, namun juga tindakan penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan. Ketika perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan untuk menghemat beban pajak perusahaan, perusahaan telah dianggap melakukan agresivitas pajak meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang legal atau tidak menyalahi peraturan. Akan tetapi, menurut (Jessica & Toly, 2014) agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak lebih mengarah kepada penghindaran pajak yang merupakan tindakan legal sebagai upaya dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dengan agresivitas pajak, yaitu dalam tindakan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi beban pajak terutang dilakukan lebih agresif.

Menurut (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019) terjadinya agresivitas pajak karena perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Ketika pemerintah membutuhkan pajak sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan oleh pemerintah, dilain pihak perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Jika perusahaan membayar pajak, maka laba bersih yang didapatkan akan berkurang.

Mayoritas transaksi yang sering dilakukan dalam agresivitas pajak adalah menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian secara fiskal, dan biaya *research and development*) yang ddigunakan perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang yang harus dibayar perusahaan berkurang.

Dengan melakukan agresivitas pajak, perusahaan melakukan penghematan untuk pengeluaran atas pajak sehingga laba menjadi lebih tinggi, atau penghematan terebut digunakan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Di lain pihak, agresivitas pajak dapat meningkatkan bonus karena laba setelah pajak meningkat. Tetapi, tindakan tersebut juga dapat merugikan perusahaan, diantaranya adalah sanksi yang berupa denda maupun turunnya harga saham sebagai akibat dari pemegang saham yang mengetahui tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR diukur dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. Menurut (Lanis & Richardson, 2012) ETR merupakan proksi yang sangat tepat digunakan dalam menghitung agresivitas pajak karena menurutnya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak, mereka juga berusaha mempertahankan pendapatan mereka secara akuntansi memiliki ETR yang lebih rendah.

#### **2.2.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

(Lanis & Richardson, 2012) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena pada hakikatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. CSR dalam hal ini dipandang sebagai strategi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh citra (*image*) yang baik di mata masyarakat. . UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2c) menyatakan bahwa laporan tahunan harus mengungkapkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan yaitu memberikan dampak yang positif di mata masyarakat, media dan

juga *stakeholder* dan juga berdampak pada keberlangsungan hidup usaha yang dapat meningkatkan laba (Ermayanti, 2016)

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholders* dibagi menjadi 2 kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.

a. *Inside stakeholders* merupakan orang-orang yang berada dalam organisasi perusahaan yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan. Pemegang saham, para manager serta karyawan merupakan salah satu bagian dari *inside stakeholders*.

b. *Outside stakeholders* adalah orang-orang maupun pihak yang berada di luar organisasi perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk dalam *outside stakeholders* adalah pemerintah, pelanggan, masyarakat lokal maupun masyarakat secara umum.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di dunia dan di Indonesia telah menjadi isu yang penting, karena berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Hal tersebut merupakan reaksi dari banyak pihak yang meresahkan adanya kerusakan lingkungan baik secara fisik, psikis maupun sosial sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak

bertanggung jawab. Oleh karena itulah tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* harus dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

*Global reporting initiative* (GRI) telah mengeluarkan sebuah pedoman yang menyediakan prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar dan panduan penerapan untuk penyusunan laporan keberlanjutan oleh organisasi apapun ukuran, sektor atau lokasinya versi 4.0 (G-4) pada tahun 2013. GRI (G-4) memiliki dibagi menjadi 2 jenis, yaitu secara umum dan khusus, penelitian ini menggunakan standar GRI (G-4) khusus karena item pengungkapannya berhubungan dengan lingkungan. Penilaian pengungkapan *corporate social responsibility* pada penelitian ini menggunakan *dummy* yaitu dinilai 1 jika mengungkapkan *corporate social responsibility* dan 0 jika tidak mengungkapkan, dan menggunakan cara *core* yaitu penilaian item pengungkapan *corporate social responsibility* dimana jika salah satu item diungkapkan maka bisa dinilai 1.

( Dalam konsep GRI (G-4) terdapat 6 indikator kinerja, diantaranya adalah indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, indikator praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, indikator kinerja hak asasi manusia, indikator kinerja kemasyarakatan/sosial, dan indikator kinerja tanggung jawab produk. Dalam setiap indikator

kinerja terdapat beberapa item seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Indikator Pengungkapan berdasarkan GRI G-4

<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
-Kinerja Ekonomi	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC 2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC 4	Bantuan financial yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC 9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
-Bahan	EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN 2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN 7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN 9	Sumber air yang secara signifika dipengaruhi oleh pengambilan air

	EN 10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN 13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN1 4	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN1 5	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN1 6	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN1 7	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN1 8	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN1 9	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN2 0	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN2 1	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN2 2	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN2 3	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN2 4	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN2 5	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang

		diangkut untuk pengiriman internasional
	EN2 6	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN2 7	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN2 8	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN2 9	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN3 0	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-asesmen pemasok atas lingkungan	EN3 2	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN3 3	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN3 4	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>SUB-KATEGORI: PRAKTEK K E T E N A G A K E R J A A N DAN KENYAMANAN BEKERJA</b>		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah

	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
-Hubungan industrial	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen- pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA 9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-keberagaman dan kesetaraan peluang	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
<b>SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA</b>		
-Investasi	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR 4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-pekerja anak	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi

		dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-praktik pengamanan	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
-hak adat	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI: MASYARAKAT</b>		
-Masyarakat Lokal	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta

		praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	S09	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK</b>		
-kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran,

		termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

### 2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan pada besar kecilnya perusahaan dan juga dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan dari perusahaan. Jika ukuran perusahaan besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat (Nugraha & Meiranto, 2015)

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan pada besar kecilnya perusahaan dan juga dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan dari perusahaan. Jika ukuran perusahaan besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat (Nugraha & Meiranto, 2015).

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan dalam menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan

tahunan perusahaan. Menurut (Cahyono, *et al* 2016:4 dalam Rina, 2016) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara misalnya total aktiva atau aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large*, *medium* dan *small firm*. Semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik pula prospek perusahaan dalam jangka waktu yang relatif panjang, dan hal tersebut pula yang membuat perusahaan berada dalam tahap dewasa.

Menurut (Jogiyanto:2000 dalam Rina, 2016) ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, hal tersebut dinilai lebih baik karena ukuran perusahaan dianggap lebih stabil dibandingkan dengan proksi-proksi lain dan cenderung berkesinambungan antar periode satu dengan periode berikutnya. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *effective tax rate* (ETR), semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rumit dan kompleks transaksi dalam perusahaan yang menyebabkan perusahaan dapat memanfaatkan lebih banyak celah untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan. (Lanis & Richardson, 2012) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka tingkat penghindaran pajak juga semakin besar. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang besar memiliki kekuatan

ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang.

### **2.2.6 Leverage**

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Hanafi, 2017, hal. 40). Jika total utang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total aset, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut tidak *solvable* atau tidak bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan berbagai cara, yaitu rasio total utang terhadap total aset, rasio *times interest earned*, dan rasio *fixed charge coverage*.

Rasio ini didasarkan pada total utang perusahaan terhadap total aset, rasio ini dihitung dengan cara menjumlahkan utang dibagi dengan total aset. Sedangkan rasio *times interest earned* diukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menggunakan laba sebelum bunga dan pajak dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan bunga. Rasio *fixed charge coverage* diukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar total beban tetap yang mencakup biaya bunga dan sewa. Rasio ini dapat diukur dengan cara menjumlahkan laba sebelum bunga dan pajak dengan biaya sewa dan dibagi dengan jumlah bunga dan biaya sewa. Ketiga rasio tersebut jika menunjukkan angka yang tinggi, maka perusahaan berada dalam situasi yang aman (risiko rendah) (Hanafi, 2017, hal. 40-42)

Menurut (Nugraha & Meiranto, 2015) jika rasio *leverage* pada perusahaan tinggi, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar/utang, sedangkan untuk perusahaan yang rasio *leverage* nya menunjukkan angka yang rendah dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu membiayai aset yang dimiliki dengan modal sendiri. Tinggi rendahnya rasio *leverage* perusahaan akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan, hal tersebut dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih rendah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Richardson & Lanis, 2007) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan akan menyebabkan *effective tax rate* (ETR) menjadi lebih kecil.

### **2.2.7 Profitabilitas**

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *profit*/laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi, 2017, hal. 42). Ada tiga cara dalam menghitung rasio profitabilitas, yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE).

Profit margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu atau juga dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menekan

biaya-biaya di perusahaan dalam periode tertentu, dan dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Rasio *return on asset* (ROA) diukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu yang diukur dengan cara laba bersih dibagi dengan total aset. Sedangkan rasio *return on equity* (ROE) digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat modal tertentu, dan dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan modal saham. Jika rasio profitabilitas menunjukkan angka yang tinggi, menunjukkan tingkat efisiensi manajemen yang tinggi.

(Rodriguez & Arias, 2012) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan faktor penentu pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar maka pajak yang dibayarkan juga lebih besar. Begipula juga dengan perusahaan yang memiliki laba yang rendah akan membayar beban pajak perusahaan yang lebih rendah pula atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian, karena ada sistem kompensasi dalam perpajakan. Dengan sistem kompensasi, perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya.

## **2.3 Pengaruh antar Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

*Corporate Social Responsibility* atau CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan atau *stakeholders* baik itu *inside* maupun *outside stakeholders*. Menurut (Jessica & Toly, 2014) semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka semakin rendah pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jessica & Toly, 2014) menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator dalam melakukan pengukuran yang didasarkan pada besar kecilnya perusahaan serta dapat menggambarkan aktivitas dan pendapatan dari perusahaan. Menurut (Nugraha & Meiranto, 2015) ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin meningkatkan produktivitas dan akan menghasilkan laba yang semakin besar. Apabila laba perusahaan besar maka pajak yang harus dibayar seharusnya juga besar.

Menurut (Richardson & Lanis, 2007) mengemukakan bahwa semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin rendah pula *effective tax rate* (ETR) yang dimiliki perusahaan atau tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Dan hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur utang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ketika perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang atau pinjaman dari luar, sedangkan perusahaan yang memiliki rasio *leverage* rendah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modal sendiri dalam membiayai asetnya.

*Leverage* berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Harjito, Sari, & Yulianto, 2017). Hal tersebut terjadi karena beban bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lanis & Richardson, 2013) bahwa beban bunga dapat mengurangi beban pajak perusahaan, oleh karena itu semakin tinggi *leverage* semakin rendah *effective tax rate* (ETR). Penelitian yang dilakukan oleh (Fionasari, Savitri, &

Andreas, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

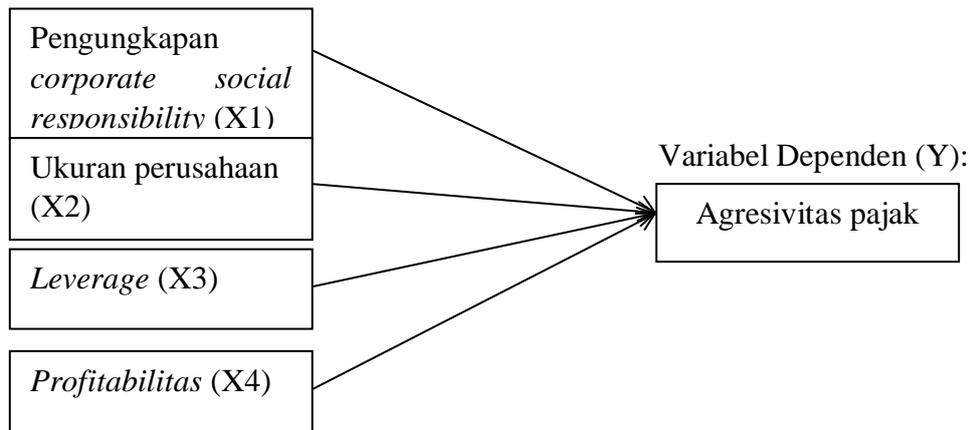
Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019). Profitabilitas menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari manajemen aset perusahaan atau yang dikenal sebagai *return on asset* (ROA). Semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan, begitu juga sebaliknya.

Jika profitabilitas dalam hal ini adalah ROA semakin tinggi, maka semakin tinggi pula laba perusahaan, dan diharapkan hal tersebut juag berbanding lurus dengan beban pajak perusahaan atau bisa dikatakan taat bayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah diprediksi bahwa beban pajak perusahaan relatif rendah dan dimungkinkan tidak taat bayar pajak karena laba digunakan untuk mempertahankan aset perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruhh negatif terhadap agresivitas pajak.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konseptual yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (X):



Gambar 1. 1 Kerangka konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H4: *Profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.